



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PONTIANAK**  
**DENGAN**  
**PUSKESMAS RASAU JAYA**  
**TENTANG**  
**KERJASAMA PRAKTEK KERJA LAPANGAN, PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BAGI DOSEN DAN MAHASISWA SERTA**  
**PERTUKARAN INFORMASI PENGGUNAAN LULUSAN**

Nomor : PP.04.03/1.3/1091.1 /2022  
Nomor : 011 Tahun 2022


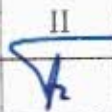
Pada hari ini Senin Tanggal Tujuh Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Pontianak, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Didik Hariyadi.,S.Gz.M.Si : Direktur Politeknik kesehatan kementerian Kesehatan Pontianak yang berkedudukan dan berkantor di Jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak, selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**.
  
2. Supratman, SKM : Kepala Puskesmas Rasau Jaya berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Puskesmas Rasau Jaya, selanjutnya dalam kesepakatan bersama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Paraf	Paraf
I	II
/	SK

- A. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- B. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- C. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- D. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- E. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- F. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 4733.
- G. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1125);
- H. Keputusan Mendikbud No.: 355/E/O/2012 tentang Alih bina Penyelenggaraan Prodi yang diselenggarakan Poltekkes Kemenkes dari Kemenkes kepada Kemendikbud;
- I. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- J. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
- K. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 403/KMK.05/2011 tentang penetapan Politeknik Kesehatan Pontianak pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Paraf	Paraf
	

- L. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan nomor HK. 01.07/I/004287/2017 tentang Petunjuk Teknis Kerjasama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Pihak Lain di Dalam Negeri.



Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani kesepakatan kerjasama tentang Praktek kerja lapangan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa serta pertukaran Informasi penggunaan lulusan antara Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak dengan Puskesmas Rasau Jaya, selanjutnya disebut "Kesepakatan" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam perjanjian kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

1. Praktek kerja lapangan adalah Praktek kerjasama Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak di wilayah Puskesmas Rasau Jaya;
2. Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak adalah peserta didik jenjang pendidikan D-III dan D-IV pada jurusan Kesehatan Lingkungan, Gizi, Keperawatan Gigi, Analisis Kesehatan, Keperawatan, Kebidanan dan Profesi NERS serta Profesi Bidan ;
3. Kegiatan pertukaran informasi lulusan dan memberikan atau menerima informasi pengetahuan dan temuan ilmiah terkini melalui temu ilmiah/seminar atau media informasi lainnya ;
4. Penggunaan lulusan adalah setiap lulusan Poltekkes Kemenkes Pontianak dapat diberdayakan di lingkungan Puskesmas Rasau Jaya sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA**
5. Penelitian adalah proses ilmiah yang dilakukan untuk mengumpulkan, mencatat dan menganalisa sesuatu masalah secara sistematis berdasarkan ilmu pengetahuan dalam upaya pemecahan masalah ;
6. Pengabdian kepada masyarakat adalah pelaksanaan pengamatan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui

Paraf	Paraf
I	II
	

- imetodologi ilmiah sebagai penyebaran, Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam mempercepat laju pertumbuhan tujuan pembangunan Nasional ;
7. Pembimbing Praktek kerja adalah seorang ahli yang dianggap mampu membimbing, ditunjuk oleh kepala Puskesmas Rasau Jaya;
  8. Dosen adalah seorang yang bertanggung jawab mendampingi dan mengkoordinasikan kegiatan praktek lapangan yang ditunjuk oleh institusi pendidikan ;
  9. Sarana dan prasarana Puskesmas Rasau Jaya adalah segala fasilitas yang tersedia di Puskesmas Rasau Jaya;
  10. Sesuatu hal dalam kesepakatan ini adalah jika fasilitas pelayanan/tempat kegiatan tidak dapat digunakan karena ada perbaikan, pembangunan, terbatasnya sumber daya lainnya pada **PIHAK KEDUA**.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Kesepakatan kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Praktek kerja lapangan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa serta pertukaran Informasi penggunaan lulusan di Puskesmas Rasau Jaya dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan umumnya dan profesionalisme lulusan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak dan mendukung tercapainya visi dan misi Puskesmas Rasau Jaya.



## BAB III RUANG LINGKUP KERJASAMA

### Pasal 3

Sarana dan Prasarana Puskesmas Rasau Jaya  
Serta pembimbing Praktik

**PIHAK PERTAMA** memanfaatkan sarana dan prasarana Puskesmas Rasau Jaya serta memberdayakan pembimbing Praktik **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kegiatan praktik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak.

### Pasal 4 Tata Cara Pelaksanaan

Paraf	Paraf
	



1. **PIHAK PERTAMA** membuat dan memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** tentang penjadwalan dalam rencana pelaksanaan satu tahun disampaikan pada awal tahun ajaran baru ;
2. Kriteria peserta Praktek kerja lapangan,ditentukan **PIHAK PERTAMA** sedangkan jumlah peserta, waktu dan tempat kegiatan ditentukan bersama oleh **KEDUA BELAH PIHAK** ;
3. **PIHAK KEDUA** memberikan informasi waktu dan tempat kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan **PIHAK PERTAMA** ;
4. Pemberitahuan pelaksanaan kegiatan ke tempat kegiatan disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** paling lambat 2 (dua) minggu sebelum melakukan kegiatan dengan tembusan kepada **PIHAK PERTAMA**.

#### Pasal 5

#### Pengawasan

1. **PIHAK PERTAMA** mengadakan supervisi sedan monitoring kemampuan Mahasiswa selama Praktik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak di Puskesmas Rasau Jaya
2. **PIHAK KEDUA** melalui Pembimbing Praktik menyelenggarakan, memantau dan melaksanakan evaluasi hasil Praktik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak dari **PIHAK PERTAMA**.



### BAB IV

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 6

#### Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

1. **PIHAK PERTAMA** berhak menggunakan fasilitas yang dimiliki **PIHAK KEDUA** untuk kegiatan Praktek kerja lapangan,Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa serta pertukaran Informasi penggunaan lulusan pelaksanaan temuan ilmiah/melalui seminar atau media informasi terkini lainnya ;
2. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan bimbingan dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Praktek kerja lapangan,Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa serta pertukaran Informasi penggunaan lulusan serta menerima

Paraf	Paraf
I	II
	

1

2

3

4

5


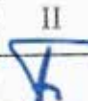
informasi pengetahuan dan melalui temuan ilmiah/seminar atau media informasi terkini lainnya ;

3. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan kompensasi biaya berdasarkan peraturan yang berlaku, kegiatan Praktek kerja lapangan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa serta pertukaran Informasi penggunaan lulusan serta memberikan informasi pengetahuan dan temuan ilmiah terkini melalui temu ilmiah/seminar atau media informasi lainnya kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pencapaian proses belajar mengajar sesuai dengan kesepakatan bersama
4. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membuat proposal, petunjuk teknik dan laporan kegiatan Praktek kerja lapangan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa serta pertukaran Informasi penggunaan lulusan kepada **PIHAK KEDUA**.
5. Berkewajiban untuk melaksanakan upaya preventif dan promotif dalam pelaksanaan di lapangan.

#### Pasal 7

##### Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapatkan kompensasi biaya Praktek kerja lapangan berdasarkan peraturan yang berlaku, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa serta pertukaran Informasi penggunaan lulusan dari **PIHAK PERTAMA** ;
2. **PIHAK KEDUA** berhak memberi sanksi kepada mahasiswa praktek kerja lapangan yang melakukan pelanggaran ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan sepengetahuan **PIHAK PERTAMA** ;
3. **PIHAK KEDUA** berhak menolak Praktek kerja lapangan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa serta pertukaran Informasi penggunaan lulusan dan kegiatan lainnya **PIHAK PERTAMA** jika **PIHAK PERTAMA** tidak mengindahkan ketentuan Pasal 4 ayat 1, atau dikarenakan ada sesuatu hal yang terjadi pada **PIHAK KEDUA** ;
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memfasilitasi **PIHAK PERTAMA** Praktek kerja lapangan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa serta pertukaran Informasi penggunaan lulusan dengan **PIHAK KEDUA** ;

Paraf	Paraf
	



5. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan hasil evaluasi Praktek kerja lapangan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa serta pertukaran Informasi penggunaan lulusan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan format evaluasi yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**

Pasal 8

Ketenagaan

1. **PIHAK PERTAMA** menunjuk penguji praktik bagi Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak dari **PIHAK KEDUA** yang ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Pontianak;
2. **PIHAK KEDUA** menunjuk Pembimbing Praktik selama kegiatan Praktik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Puskesmas Rasau Jaya



BAB V

PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 9

Biaya Praktik

1. Besaran Honor/Intensif Pembimbing praktek sesuai dengan peraturan daerah setempat
2. Mahasiswa setiap kegiatan Praktik tidak mencapai target dapat melanjutkan ditempat semula atau pindah di puskesmas lain, maka pembayaran akan di bebankan kepada Mahasiswa yang bersangkutan dengan mengikuti aturan Puskesmas setempat
3. Pembayaran dilakukan kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara setoran tunai melalui kasir Penerima Puskesmas Rasau Jaya
4. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan praktik mahasiswa menggunakan bahan habis pakai medis atau terjadi kerusakan pada peralatan yang digunakan pada saat pelaksanaan kegiatan praktik yang disebabkan oleh kelalaian mahasiswa, maka segala bentuk pembiayaan yang berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas menjadi kewajiban dan atau tanggung jawab dari **PIHAK PERTAMA**.

Paraf	Paraf
I	II
	

Pasal 10  
Tata Cara Pembayaran



1. **PIHAK PERTAMA** membayar biaya Praktik PKL Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya rincian tarif;
2. Apabila ada keterlambatan dalam melakukan pembayaran kami sebagai **PIHAK KEDUA** akan menunda praktik mahasiswa periode berikutnya sampai pembayaran di selesaikan;
3. Pembayaran dilakukan kepada **PIHAK KEDUA** dengan kesepakatan kedua belah pihak.

BAB VI  
JANGKA WAKTU PERJANJIAN  
Pasal 11

1. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani dan berlaku untuk jangka waktu 4 (Empat) Tahun ;
2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, Para Pihak sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian ini;
3. Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian maka perjanjian ini secara otomatis berakhir.

BAB VII  
*FORCE MAJEURE*  
Pasal 12

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satu pihak mengalami keterlambatan atau gagal melaksanakan perjanjian ini karena *force majeure*, maka pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari setelah terjadi *force majeure* tersebut;

Paraf	Paraf
I	II
	

2. *Force majeure* dalam perjanjian ini adalah terjadinya hal-hal yang diluar kendali control dari salah satu pihak seperti peperangan, blokade, pemberontakan, kebakaran,kerusuhan, sabotase, epidemic atau bencana alam seperti banjir gempa bumi dan hal-hal lain diluar kemauan dan kemampuan kedua pihak;
3. Apabila *Force majeure* tersebut terjadi sehingga para pihak dalam perjanjian ini tidak dapat melaksanakan perjanjian ini, maka para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah.

## BAB VIII

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

#### Pasal 13

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh Para Pihak, Apabila Para Pihak tidak berhasil mencapai mufakat, Para Pihak sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Pontianak.

## BAB IX



### PEMBERITAHUAN

#### Pasal 14

1. Semua surat-menyurat atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perludilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faximili dan dialamatkan kepada

**PIHAK PERTAMA** : POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK  
 Jalan : 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak  
 Telepon/Fax : (0561) – 882632  
 Email : humaspoltekkespontianak@gmail.com  
 Website : poltekkes-pontianak.ac.id

**PIHAK KEDUA** : Puskesmas Rasau Jaya  
 Jalan : Jenderal Sudirman  
 Telepon : .....  
 Email : .....

Paraf	Paraf
I	II
	

2. Pemberitahuan yang di serahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tandatangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui faximile dianggap telah diterima pada saat telah diterima pada saat diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman telex dan konfirmasi faximili pada pengiriman faximili.

**BAB X**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 15

1. Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Para Pihak;
2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu *addendum/amandemen* atas persetujuan Para Pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini;
3. Para Pihak sepakat dan setuju apabila dikemudian hari terdapat peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan perjanjian ini, akan ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Penutup

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, materai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Para Pihak.

**PIHAK KEDUA**

Kepala,  
Puskemas Rasau Jaya



NIP. 197105261993031006

**PIHAK PERTAMA**

Direktur,  
Politeknik Kesehatan Kementerian  
Kesehatan Pontianak

Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si  
NIP. 197112311992031010

Paraf	Paraf
I	II

